

DAMPAK KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT DI INDO-PASIFIK DALAM MENGHADAPI CHINA TERHADAP KEAMANAN INDONESIA

Mariane Olivia Delanova¹

Yanyan Mochamad Yani²

Universitas Jenderal Achmad Yani¹

Universitas Padjadjaran²

Email:

delanovamariane@gmail.com

Abstrak

Meningkatnya eskalasi ketegangan yang menimbulkan potensi konflik di kawasan Indo-Pasifik membuat Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki letak geografis di kawasan Indo-Pasifik merasakan ancaman yang nyata terhadap keamanan kedaulatan negara Indonesia. Amerika Serikat yang merasa terancam dengan bangkitnya China yang muncul sebagai pemain global membuat AS mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menghalau adanya hegemoni China di dunia. China sendiri telah melakukan sebuah klaim sepihak terhadap Laut China Selatan yang membuat AS dan berbagai negara geram dengan adanya klaim ini. Kebijakan-kebijakan apa saja yang dikeluarkan oleh AS dalam rangka menghalau hegemoni China di kawasan Indo-Pasifik? Apakah kebijakan-kebijakan tersebut memiliki sebuah dampak positif ataupun dampak negatif bagi Indonesia? Penulis akan menjelaskan hal-hal tersebut dalam artikel ini.

Kata Kunci: kebijakan, Indo-Pasifik, Amerika Serikat, China, pertahanan

PENDAHULUAN

Kawasan Indo-Pasifik saat ini menjadi salah satu kawasan yang cukup ‘panas’ karena terdapatnya dinamika kepentingan negara-negara besar yang ada di dunia sedang terancam dengan adanya klaim sepihak Laut China Selatan (LCS) oleh China yang berdasar terhadap *nine dash line* Laut Cina Selatan adalah salah satu jenis laut yang dikelilingi beberapa daratan utama dan memiliki batasan dengan berbagai yuridiksi negara. Secara geografis LCS sendiri merupakan bagian dari Samudra Pasifik, yang

meliputi area dari Selat Karimata dan Malaka hingga Selat Taiwan dengan bentang sekitar 3.500.000 kilometer persegi (1.400.000 mil persegi)¹.

LCS memiliki nilai strategis yang sangat besar karena sebagian besar pengiriman antar negara di dunia bergerak melalui kawasan tersebut dan total muatan tersebut berkisar hingga 3 triliun US Dollar tiap tahun nya. Muatan strategis itu meliputi perikanan yang menguntungkan dan sangat penting untuk keamanan pangan bagi jutaan penduduk di Asia Tenggara. Selain perikanan, cadangan minyak dan gas yang sangat besar diyakini berada di bawah dasar laut nya. AS melihat hal ini sebagai laut yang strategis dan tidak dapat begitu saja diklaim oleh China. Sejak tahun 2020, Menteri Luar Negeri AS yaitu Mike Pompeo yang mengatakan bahwa klaim maritim atas LCS oleh China merupakan sesuatu yang ilegal dan tidak mematuhi hukum UNCLOS.

Kebijakan-kebijakan yang dibentuk AS di kawasan Indo-Pasifik merupakan redefinisi dan memposisikan hubungan antara AS dengan China yang merupakan sebuah kerangka persaingan strategis yang komprehensif. Tujuan adanya kebijakan militer AS di LCS telah meningkat dengan adanya aksi-aksi intelijen serta pengiriman kapal-kapal tempur seperti kapal penghancur dan kapal induk melakukan latihan gabungan di kawasan tersebut. Sistem kekuatan militer AS yang terorganisir dengan baik dibentuk oleh formasi kapal induk, kapal selam, drone tak berawak, dan pembom terkait dengan sistem pertahanan China di LCS.

Dengan adanya ancaman baru di kawasan Indo-Pasifik, AS berusaha untuk menanamkan doktrin terhadap negara-negara sekutu AS yang berada di kawasan Indo-Pasifik untuk bersama-sama menganggap bahwa China merupakan ancaman bagi kawasan dan global.

AS berkeinginan untuk memfasilitasi confidence building measures sesuai dengan *Declaration on a Code of Conduct* tahun 2002 serta mendukung penyusunan draf lengkap tata berperilaku (*code of conduct*)². Kekuasaan berbasis aturan merupakan

¹ Wang, J. C. (1992). *Handbook on Ocean Politics & Law*. Greenwood Publishing Group., hal. 14

² Darmawan, A. B., & Ndadari, G. L. (2017). Keterlibatan Amerika Serikat dalam Sengketa Laut Tiongkok Selatan pada Masa Pemerintahan Presiden Barack Obama. *Jurnal Hubungan Internasional*, 6(1), 1-15. Hal 6

“way of life” bagi Amerika Serikat untuk mempertahankan situasi dominannya, dan juga titik paling kritis untuk mengontrol tatanan di kawasan Laut Cina Selatan.

Amerika Serikat menilai bahwa kebijakan China di kawasan Laut China Selatan merupakan kebijakan yang sangat agresif dan membuat dampak negatif terhadap keamanan kawasan maritim di Indo-Pasifik karena melawan hukum laut yang sudah ditentukan dalam UNCLOS, adanya kebijakan ini dapat membuat stabilitas keamanan di kawasan Indo-Pasifik terganggu termasuk negara sekutu AS dan Indonesia yang berada di kawasan ini.

PEMBAHASAN

AS memiliki berbagai kepentingan di Laut China Selatan. Kepentingan-kepentingan itu diungkapkan Amerika Serikat dalam beberapa forum internasional kepada media. Pertama, menerapkan hukum laut internasional (UNCLOS), kedua, bekerja untuk keamanan dan stabilitas regional di kawasan, dan ketiga, menjaga jalur perdagangan internasional dengan memastikan perkembangan ekonomi dunia dengan akses bebas ke laut dari Cina selatan. Setiap tahun, perdagangan bebas lintas wilayah mencapai \$5,3 triliun. Dimana Amerika Serikat mendapat angka 1,2 triliun dollar AS.

Amerika Serikat, ketika menghadapi China di Laut China Selatan, mengatakan akan menjaga stabilitas, menegakkan kebebasan laut dengan cara yang konsisten dengan hukum internasional, menjaga arus perdagangan tanpa hambatan, menghalangi dan menolak segala upaya untuk menggunakan paksaan atau kekerasan untuk menyelesaikan sengketa. Amerika Serikat tidak menyangkal memiliki kepentingan di Laut Cina Selatan dan bersedia berbagi kepentingan jangka panjang atau bahkan jangka panjang dengan banyak sekutu dan negara mitra yang telah lama mendukung tatanan internasional berbasis aturan di Laut China Selatan.

Bagi Amerika Serikat, dunia tidak akan membiarkan China melihat Laut China Selatan sebagai proyek kekuatan maritimnya. Atas permintaannya, Amerika Serikat akan berdiri bersama sekutu dan mitranya di Asia Tenggara untuk mempertahankan hak kedaulatannya atas sumber daya lepas pantai, sesuai dengan hak dan kewajibannya,

sesuai dengan hukum internasional. Amerika Serikat berdiri bersama komunitas internasional dalam membela kebebasan laut dan menghormati kedaulatan, dan menolak segala upaya untuk memaksakan "*might makes right*" di Laut Cina Selatan atau bahkan di wilayah yang lebih luas.

Amerika Serikat sebagai negara adidaya yang memiliki hegemoni tinggi diantara negara-negara lain tidak ingin kepentingannya terganggu oleh rival atau negara lain. Oleh sebab itu AS mengeluarkan berbagai kebijakan yang berguna untuk mempertahankan hegemoninya secara global di dalam sebuah kawasan tertentu. Kebijakan-kebijakan ini cenderung ofensif dan berhadapan dengan China secara langsung maupun tidak langsung.

Quadrilateral Alliance

Kebijakan pertama yang dikeluarkan oleh AS yaitu mengoptimalkan sebuah kerangka kerjasama pertahanan yang bernama *Quad* yang sebelumnya disebut *Quadrilateral Security Dialogue*. Quad merupakan sebuah kerangka kerjasama pertahanan yang terdiri atas Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan India. Kerjasama ini awalnya dibentuk pada tahun 2007 dengan diawali oleh Perdana Menteri Jepang kala itu Shinzo Abe. Agenda pertama dari kerjasama ini yaitu diadakannya latihan militer bersama berskala besar yang disebut sebagai *Malabar Exercise*.

Setelah sempat stagnan, Quad 2017 akhirnya kembali menjadi agenda keempat negara tersebut. Pada KTT ASEAN ke-30 tahun 2017, Perdana Menteri Australia, Perdana Menteri Jepang, Perdana Menteri India dan Presiden Amerika Serikat sepakat untuk menghidupkan kembali pakta pertahanan pada isu-isu strategis di Laut Cina Selatan yang disebabkan oleh ambisi teritorial China dalam menguasai sebuah kawasan. Pertemuan tersebut secara khusus membahas meningkatnya kepentingan di Laut Cina Selatan dan kebangkitan formal *Quad* melalui pembentukan aliansi pertahanan. Dari

konferensi ini, Dialog Keamanan *Quad* telah distabilkan kembali dan berganti nama menjadi *Quadrilateral Alliance (Quad)*³.

Pemerintah AS di bawah Joe Biden semakin memperkuat kehadirannya di kawasan Asia-Pasifik. Melalui Quad, Amerika Serikat berkomitmen untuk memperbarui visi dan misinya di kawasan. Amerika Serikat serius merevitalisasi hubungan dengan India, Jepang dan Australia. Menlu juga melakukan komunikasi virtual dengan Menlu AS Antony Blinken, Menlu Marise Payne, Menlu Toshimitsu Motegi, dan Menlu Subramaniam Jaishankar. Pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Quad penting untuk memajukan tujuan bersama para anggota: Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka dan menghadapi tantangan untuk menentukan waktu bersama. Keempat negara ini setuju dengan adanya gagasan FOIP (*Free and Open Indo-Pacific*) dalam rangka mewujudkan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.

Menteri Luar Negeri Jepang Motegi juga menekankan bahwa Quad akan memperdalam koordinasinya dengan ASEAN, Pasifik dan Eropa. Jerman, Prancis, dan Belanda juga mendekati masalah Indo-Pasifik sebelumnya. Bahkan, nama China tidak disebutkan dalam pernyataan quad. Namun, menurut analis, kekuatan pendorong utama di balik penciptaan quad adalah China. Quad menolak upaya China atas klaim sepihak di banyak tempat, termasuk Laut China Selatan dan Laut China Timur. Semua anggota quad juga memiliki masalah dengan China. Amerika Serikat memiliki konflik yang kompleks dalam perdagangan, teknologi, hak asasi manusia, dari Hong Kong hingga Taiwan.

Freedom of Navigation

Kebijakan kedua yang dikeluarkan oleh AS yaitu adanya operasi FONOP (*Freedom of Navigation Operations*) untuk mewujudkan implementasi dari hukum internasional terkait kebebasan berlayar di lautan atau yang biasa disebut *Freedom of*

³ Gale, J. B., & Shearer, A. (2018). *The Quadrilateral Security Dialogue and the Maritime Silk Road Initiative*. Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Navigation (FON)⁴. FONOP menerapkan UNCLOS dan menghindari bentuk dan potensi konflik dengan memperkuat norma kebebasan navigasi dengan mengizinkan kapal melewati semua perairan yang diizinkan berdasarkan ketentuan UNCLOS. Kebebasan navigasi di bawah UNCLOS dan hukum kebiasaan internasional.

Amerika Serikat, melalui Departemen Pertahanan, FONOP merupakan tantangan operasional untuk klaim maritim yang berlebihan, Amerika Serikat sangat menentang klaim maritim yang terancam berlebihan, dan Amerika Serikat adalah kenyataan bagi keamanan global untuk mencegah kerugian akibat masalah ini. negara. Jika FONOP adalah metode asli, itu dimulai oleh Amerika Serikat, FONOP dimulai sebagai program navigasi gratis, dan kegiatannya dilakukan, dibahas, dan diperbarui setiap tahun. Saat diluncurkan, program ini akan mencakup laporan tahunan dan publikasi berbagai klaim maritim internasional yang terjadi di seluruh dunia.

Munculnya kebijakan FONOP oleh AS sebagai salah satu instrumen dalam menegakkan pelayaran laut bebas yang merupakan hukum internasional dan berbasis kepada kebiasaan internasional. Faktanya, AS sendiri tidak pernah meratifikasi UNCLOS tetapi saat ini AS menjadi negara yang sangat bersikeras dalam menegakkan hukum-hukum maritim yang sebenarnya mengacu kepada UNCLOS. AS mulai menggeser kepentingan luar negeri mereka serta berfokus terhadap perairan di Indo-Pasifik, AS juga mencoba menjalin komunikasi aktif dengan ASEAN agar mereka tidak ikut terbawa dalam upaya hegemoni China khususnya di LCS.

Kebijakan luar negeri AS di Laut China Selatan telah mengupayakan berbagai bentuk kebijakan untuk mendukung tujuan tersebut. Di bawahnya, mereka membantu sekutu mereka di Asia Tenggara dengan memperkuat pertahanan mereka dengan mengirimkan dana, senjata, pesawat atau bahkan kapal perang. Di sisi lain, Amerika Serikat juga tertarik untuk menjaga kebebasan navigasi di kawasan melalui “operasi militer” sebagai bentuk pengakuan atas hak tersebut. Oleh karena itu, bentuk kebijakan AS untuk mengejar kebebasan navigasi di Laut China Selatan adalah operasi militer.

⁴ Berkofsky, A. (2018). US Freedom of Navigation Operations (FONOPs) in the South China Sea—Able to Keep Chinese Territorial Expansionism in Check?. In *US Foreign Policy in a Challenging World* (pp. 339-356). Springer, Cham.

Operasi militer (*military operations*) adalah tindakan AS dengan mengirimkan kapal perang dan kapal lainnya untuk berlayar bahkan di dekat kawasan Laut China Selatan dan kegiatan reklamasi China. China telah menetapkan *anti access area denial* (A2AD) di Laut China Selatan (hingga melewati *second island chain*). Ini menunjukkan ambisi dan minat China yang semakin besar di LCS⁵.

Kebijakan tersebut, dilakukan melalui operasi militer, untuk memasuki laut teritorial dalam jarak 12 mil dari karang, yang awalnya tenggelam tetapi muncul kembali sebagai daratan yang dibangun oleh China, seperti di kawasan Subi Reef. Dalam hukum internasional, memasuki laut teritorial suatu negara yang memiliki semua hak atas laut tersebut merupakan pelanggaran kedaulatan. Namun, hal ini tentu tidak berlaku untuk kawasan Laut China Selatan, meski sudah menjadi subjek pembangunan China dan dianggap sebagai bagian dari kedaulatannya. Oleh karena itu, tindakan militer merupakan masalah hukum bagi setiap negara yang melakukan kegiatan maritim sesuai dengan Konvensi Internasional tentang Laut Lepas.

Operasi FON juga melewati wilayah sepanjang 12 mil yang diklaim oleh Filipina dan Vietnam atau negara lain di Laut Cina Selatan. Melalui program FON, Amerika Serikat menantang klaim maritim yang berlebihan di kawasan untuk mematuhi hukum internasional. Restorasi yang terjadi di Laut Cina Selatan tidak mewakili kepemilikan pulau setelahnya. Mereka awalnya hanya lahan basah di dalam air dan kemudian menjadi landasan pacu dan sebagainya. Karenanya AS menegaskan bahwa “mengubah batu bawah laut menjadi lapangan terbang sama sekali tidak memberikan hak kedaulatan atau pembatasan izin pada transit udara atau laut internasional”⁶.

Amerika Serikat juga akan menginvestasikan lebih dari US\$8 miliar dalam pengembangannya untuk membuktikannya sebagai kekuatan militer paling kuat dan terancang di dunia. Amerika Serikat berencana mengembangkan senjata di perairan untuk memperluas jangkauannya di Laut Cina Selatan dengan meminimalkan risiko dan

⁵ Fouse, D. (2015). US-Japan Alliance Confronts the Anti-Access and Area Denial Challenge: Toward Building Capacity, Cooperation and Information Sharing in the Western Pacific. Asia-Pacific Center for Security Studies Honolulu United States. Hal 2

⁶ Daugirdas, K., & Mortenson, J. D. (2015). US Navy Continues Freedom of Navigation and Overflight Missions in the South China Sea Despite China's "Island-Building" Campaign. The American Journal of International Law, 109(3), 667.

memaksimalkan keuntungan. Kapal selam tak berawak adalah solusi sempurna untuk mewujudkan mimpi ini. Dengan menghindari penggunaan senjata yang dapat mengganggu stabilitas dan psikologi dalam kawasan.

Kebijakan AS-FON untuk operasi militer di Laut Cina Selatan mendapat dukungan dari Filipina. Dalam perkembangannya, Filipina melakukan latihan militer bersama dengan kapal induk USS John C. Stennis. Operasi kapal induk membantu melindungi kapal yang menavigasi daerah konflik. Latihan militer dilakukan melalui kunjungan ke wilayah perairan Filipina⁷. Setelah itu, ia berlayar di perairan Filipina dan menuju wilayah yang diklaim oleh Filipina. China juga mengklaim bentuk tuntutan Filipina di kawasan itu. Kemajuan militerisasi di wilayah China ini telah menimbulkan keprihatinan serius bagi negara-negara tetangga, tidak terkecuali Filipina. Berbeda dengan Filipina yang tidak melakukan operasi militer dengan militer AS di Laut China Selatan, namun ternyata kebijakan AS banyak mendapat dukungan dari negara-negara Asia. Misalnya Malaysia dan Singapura, mendukung operasi AS di Laut Cina Selatan untuk menanggapi pembangunan dan reklamasi di kawasan tersebut dengan tujuan untuk mengurangi ketegangan. Bahkan Indonesia yang sempat terlibat perseteruan dengan Cina akibat “nine dash line” yang memasukkan Pulau Natuna didalamnya juga mendukung kegiatan AS di kawasan tersebut. Hal ini bernilai positif dengan mendukung tindakan AS dengan melakukan upaya terbaik untuk mengamankan rute pelayaran internasional.

Kebijakan AS terhadap FON melalui kegiatan militer di Laut China Selatan tidak hanya diperjuangkan dengan eksploitasi kapal induk dan kapal perang yang dilengkapi senjata berteknologi tinggi. Namun, kebebasan navigasi yang diinginkan oleh Amerika Serikat juga mencakup hak untuk terbang di atas⁸. Hal ini tentunya didukung oleh perjanjian internasional yang berkaitan dengan kegiatan udara (hukum penerbangan dan antariksa internasional) dalam kerangka wilayah maritim internasional. Ini harus menjadi bagian integral dari kebebasan navigasi di zona maritim. Dalam hal wilayah yang tidak berada di bawah kedaulatan suatu negara dapat

⁷ Bahri, M. (2020). Kebijakan Freedom Of Navigation Amerika Serikat Di Laut Tiongkok Selatan. WANUA: Jurnal Hubungan Internasional, 5(2), 122-151.

⁸ Harun, U. (2020). *Buku: Politik Kebijakan Poros Maritim*.

dilalui secara bebas oleh negara manapun baik melalui darat, laut maupun udara. Hal ini tentu saja dijamin oleh hukum internasional sepanjang tidak mengganggu atau mengancam perdamaian dan merugikan kepentingan umum.

Dari segi kekuatan dan kemampuan militer, China masih jauh tertinggal dari Amerika Serikat. Terutama karena AS memiliki banyak sekutu di sekitar China. Sementara itu, kekuatan militer utama China ada di darat. Berdasarkan keputusan PCA, badan hukum tidak dapat menarik ZEE. Hal ini dibantah oleh China. China mengklaim empat gugusan pulau (Four Sha) di Laut China Selatan menjadi satu wilayah kepulauan. China telah mengembangkan posisi hukum untuk memastikan bahwa kepercayaan/teori baru melegitimasi klaimnya atas Laut China Selatan. (Ambisi Hukum China).

Free and Open Indo-Pacific

Ketiga, kebijakan AS dalam upaya menghalau pesaing strategis di kawasan Indo-Pasifik yaitu China, AS melakukan komunikasi aktif dengan salah satu organisasi regional yaitu ASEAN. Konsep Indo-Pasifik Amerika Serikat dan sekutunya mencakup strategi untuk melayani negara-negara di kawasan, termasuk ekonomi, politik, keamanan, dan budaya. Strategi ini sejalan dengan standar keseimbangan karena China menjadi negara revisionis yang bertujuan untuk status quo. Sementara itu, ASEAN telah menetapkan definisi sendiri tentang desain kerjasama Indo-Pasifik, yang sesuai dengan standar regional yang juga diakui oleh mitra non-regional. Inisiatif ASEAN dipandang sebagai sarana untuk melindungi perebutan kekuasaan di kawasan antara Amerika Serikat dan China.

Menantang kerangka kerja sama Indo-Pasifik antara ASEAN dan Amerika Serikat sejauh itu mempengaruhi negara-negara kecil di benua Asia dengan memberikan pinjaman infrastruktur yang tidak berkelanjutan. Selain tuduhan terhadap China, Strategi Keamanan Nasional AS 2017 di bawah Presiden Donald Trump juga mengatakan, “China telah menggantikan Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik, memperluas cakupan model ekonomi yang dipimpin negara. Perubahan nama simbolis dilakukan dari Komando Pasifik AS menjadi Komando Indo-Pasifik.

Tanggapan AS terhadap kebangkitan China dengan mengusulkan langkah di Indo-Pasifik dipandang seimbang. Amerika Serikat juga berusaha untuk mempertahankan posisi hegemoni unipolarnya di dunia dengan memperluas kehadiran militernya di berbagai belahan dunia, termasuk Asia⁹. Bahkan, banyak negara Asia Timur Laut seperti Jepang dan Korea juga secara bertahap berkembang menjadi negara maju. Namun, tidak seperti Jepang dan Korea Selatan, China tidak menunjukkan niat untuk bersekutu dengan Amerika Serikat dan sekutu tradisionalnya. Dengan demikian, kekuatan kebangkitan global China dipandang sebagai ancaman bagi Amerika Serikat dan harus diseimbangkan dalam segala aspek yang diperlukan agar citra hegemonik Amerika Serikat mengundang negara-negara di kawasan strategisnya. di mana negara-negara itu berada, tidak menanggapi undangan China.

Selain itu, kehadiran Jepang dan Australia dalam rencana kerja sama Indo-Pasifik juga dianggap sebagai akumulasi kekuatan sekaligus sebagai penyeimbang eksternal bagi AS untuk menghadapi ancaman dari China dan dapat mengundang mitra-mitra negara ASEAN agar bergabung satu tujuan. Apa yang dilakukan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Trump dalam hal keseimbangan bukanlah hal baru dibandingkan dengan kebijakan pemerintahan sebelumnya di kawasan itu; Faktanya, komitmennya terhadap kemakmuran kawasan Indo-Pasifik masih belum pasti.

Ketegangan antara China dan Taiwan saat ini mendorong kapal dan pasukan AS melakukan operasi kehadiran di sekitar Laut China Selatan hingga perairan di sekitar Selat Taiwan. Selain komponen dari Amerika Serikat, ada elemen dari Jepang, Australia, bahkan Kanada yang juga melakukan operasi kehadiran di Laut China Selatan dan sekitarnya. Ke depan, kemungkinan banyak kapal perang asing akan datang ke Laut Timur, karena beberapa negara Barat seperti Jerman, Prancis, Belanda dan Inggris juga telah melakukan gerakan untuk menarik perhatian mereka ke laut Indo-Pasifik. Amerika Serikat mengambil kesempatan untuk mendukung Taiwan dalam menghadapi tekanan China. Jika keadaan berubah dari buruk menjadi lebih buruk, Taiwan bisa menjadi

⁹ Suharman, Y. (2019). Dilema Keamanan dan Respons Kolektif ASEAN Terhadap Sengketa Laut Cina Selatan. *Intermestic: Journal of International Studies*, 3(2), 127-146.

medan pertempuran antara Amerika Serikat dan Cina baik dari segi materi maupun pengaruh di Laut Cina Selatan.

AUKUS

Pada tanggal 15 September 2021 lalu, AS mengumumkan aliansi trilateral pertahanan dan keamanan strategis yang bernama AUKUS yang merupakan akronim dari Australia, *United Kingdom*, dan *United States*. Aliansi ini bertujuan awal untuk membangun kapal selam yang bertenaga nuklir, namun tujuan dari aliansi ini juga untuk menjaga keamanan kawasan Indo-Pasifik yang saat ini mulai tergerus dengan adanya hegemoni China di kawasan tersebut yang dapat mengganggu stabilitas keamanan kawasan.

Kehadiran kapal selam nuklir yang diperoleh Australia merupakan potensi ancaman langsung terhadap kedaulatan di Indonesia dan Asia Tenggara. Karenawilayah tersebut sering menghadapi tantangan dan gejolak di atas perairan dan di bawah permukaan air. Kementerian luar negeri perlu mengupayakan berbagai dialog untuk mempertimbangkan kembali kepada negara-negara terkait untuk pembuatan kapal selam nuklir tersebut. Perairan Indonesia merupakan salah satu kawasan yang termasuk dalam zona bebas nuklir Asia Tenggara, maka dari itu adanya hal ini merupakan ancaman bagi Indonesia. Pemerintah harus melakukan perubahan atau memperketat kebijakan-kebijakan pertahanan karena hal ini merupakan ancaman bagi kedaulatan Indonesia.

Analisis Dampak terhadap Indonesia

Akibat tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19, sektor pertahanan juga terkena imbasnya, termasuk di Indonesia. Indonesia sendiri juga telah mengumumkan pemotongan setidaknya \$590 juta dalam anggaran pertahanannya. Relokasi anggaran pertahanan yang signifikan ini berdampak langsung pada kekuatan pertahanan TNI AL, yang berdampak serius mengingat kepemimpinan TNI AL di sektor pertahanan maritim Indonesia dan Amerika Serikat, yang berimplikasi signifikan bagi TNI AL. baik dalam konteks operasi tradisional maupun keamanan non-tradisional. Indonesia sendiri

merupakan salah satu negara yang memotong anggaran pertahanannya paling banyak di Asia, di luar Indonesia, dalam menanggapi dampak dari pandemi Covid-19, Thailand telah memotong anggaran pertahanannya sebesar \$555 juta, Selanjutnya adalah Malaysia. Vietnam dan Filipina juga mengalami hal yang sama, meski belum secara tegas mengumumkan porsi anggaran pertahanan mana yang telah direalokasikan untuk pandemi Covid19.

Kondisi ini semakin berbahaya ketika kemampuan pertahanan negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, di bidang pertahanan maritim semakin menurun, menghadapi ancaman yang semakin meningkat. Dalam beberapa bulan terakhir, China telah meningkatkan agresinya melalui kegiatan maritim di Laut China Selatan. Pada bulan April, ketika pandemi Covid-19 mulai menarik perhatian dunia, sebuah kapal penjaga pantai China menabrak kapal nelayan Vietnam di Paracels. Di tengah pandemi, pemerintah China sebenarnya telah mengirimkan kapal-kapal penjelajah ke Laut China Selatan untuk mensurvei dasar laut bahkan di luar landas kontinen Malaysia. Operasi yang dipimpin China itu akan terus melakukan penyelidikan untuk mencari sumber energi berupa gas alam dan minyak

Mengingat kejadian ini terjadi dalam rangka merebaknya pandemi Covid-19, tampaknya China justru memanfaatkan kelemahan negara-negara pengklaim di Laut China Selatan untuk meningkatkan dan memperkuat klaim kedaulatannya. Indonesia perlu lebih mengantisipasi dan mempersiapkan tantangan keamanan maritimnya, terutama di zona ekonomi eksklusif di sekitar Kepulauan Natuna utara, di mana China sering mengirim kapal penangkap ikan dan pasukan penjaga pantai.

Skenario terburuk di LCS adalah persaingan semakin ketat, Indonesia tidak bisa menghindar dan bisa mengadopsi Naval Regime yang merupakan flash point dari LCS. Naval Arms Control dan Naval Navigation Mode, dua faktor yang bisa diperhitungkan untuk posisi Indonesia. Jika Indonesia gagal melakukannya, Singapura ditugaskan untuk mengajukan konsep keamanan maritim, di mana pada akhirnya Singapura memiliki terlalu banyak data dan informasi. Sebuah contoh insiden, melibatkan pelanggaran di wilayah yang dikuasai oleh Jepang, negara yang dikendalikan oleh Amerika Serikat. Upaya Indonesia membangun blok di Laut China Selatan dapat terus dibangun dan

dilanjutkan. Pengawasan senjata angkatan laut, yang dapat berbentuk banyak negara, memerlukan kesepakatan tertulis mengenai pembatasan kapal yang melewati Laut Cina Selatan, seperti pembatasan jumlah, pergerakan terbatas, laporan. Kepentingan nasional Indonesia harus dilindungi, khususnya di Laut Cina Selatan.

Melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Indonesia mempromosikan Program Kerjasama Indo-Pasifik, yang mencakup peningkatan dialog dan persatuan antar negara-negara ASEAN untuk mengatasi isu-isu internasional dan regional¹⁰. Kegiatan ekonomi mengarah ke laut. Kawasan bisnis dekat dengan pantai karena pilihan koneksi yang mudah. Tepian LCS akan menjadi kawasan industri dan rantai nilai global yang terdiversifikasi. Hal ini baik bagi ASEAN untuk memperluas koneksinya. Selain itu. Kawasan ini menarik banyak investor karena kepastian hukumnya yang jelas di negara-negara ASEAN. Kawasan ASEAN menjadi sangat strategis. Jika terjadi konflik terbuka di Laut China Selatan, stabilitas kawasan akan sangat terganggu.

Membaca data World Economic Forum (WEF) 2021, tren ke arah perang tradisional masih mungkin terjadi (masih terjadi di Afrika, Timur Tengah), tetapi Laut China Selatan mungkin masih stabil. Hal ini dikarenakan perlunya kesiapan finansial dan militer kedua negara, terutama dalam menghadapi pandemi yang akan merugikan perekonomian dunia. Di masa depan, ancaman siber bisa menjadi bagian dari konflik AS-China di Laut China Selatan, termasuk ancaman hukum¹¹.

Pengembangan kerangka kerja sama Indo-Pasifik dari perspektif Indonesia didasarkan pada prinsip kerja sama yang terbuka, terintegrasi, transparan, dan ditekankan terhadap kerjasama¹². Konsep kerja sama Indo-Pasifik pada hakikatnya merupakan upaya untuk mewakili kepentingan Indonesia dalam memperkuat kerja sama di kawasan Indo-Pasifik, dalam agenda penguatan kerja sama, konektivitas, dan pembangunan berkelanjutan di bidang maritim. Dengan perairannya yang luas, Indonesia akan menghadapi peluang sekaligus tantangan dalam proses penguatan

¹⁰ Nathalia, T. (2018). Indonesia presents Indo-Pacific cooperation concept at ASEAN ministerial meeting. Jakarta Globe.

¹¹ Ibid

¹² Yanuarti, I., Wibisono, M., & Midhio, I. W. (2020). Strategi Kerja Sama Indo-Pasifik Untuk Mendukung Pertahanan Negara: Perspektif Indonesia. *Strategi Perang Semesta*, 6(1). Hal 44

arsitektur di kawasan Indo-Pasifik. Konsep kerja sama Indo-Pasifik yang dilandasi politik luar negeri yang bebas dan positif juga sejalan dengan visi mewujudkan Indonesia sebagai poros pelayaran dunia yang juga menjadi arah pembangunan pertahanan.

Pembangunan kekuatan pertahanan sangat penting bagi penguasaan pemerintahan suatu negara yang berdaulat. Indonesia menganut dan menerapkan sistem pertahanan semesta (Sishanta) yang tidak agresif dan tidak ekspansif untuk melindungi kepentingan nasional dalam rangka menjawab berbagai tantangan dan ancaman. Namun, dinamika lingkungan strategis tampaknya masih menjadi tugas berat bagi pertahanan negara. Isu geopolitik masih membentuk hubungan antar negara di kawasan. Sebagai contoh, konflik antara Amerika Serikat dan China tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi dan perdagangan, tetapi juga pengaruh kawasan yang semakin besar terhadap stabilitas dan keamanan Asia, terutama pada konflik di Laut China Selatan. Ketegangan antara AS dan China dapat meluas menjadi ancaman bagi stabilitas keamanan regional¹³.

Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan dua pertiga luas lautannya lebih besar dari daratan. Luas wilayah perairan Indonesia adalah 77% dari luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Posisi silang Indonesia berimplikasi pada peluang dan tantangan dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah. Memahami situasi ini, para *founding fathers* merumuskan dan mengusulkan Deklarasi Juanda pada tahun 1957 sebagai pedoman bagi masyarakat internasional untuk mengakui kedaulatan maritim Indonesia¹⁴.

Dinamika lingkungan strategis menunjukkan banyak perubahan di kawasan, terutama sehubungan dengan penurunan hegemoni AS secara bertahap karena kebangkitan China yang cepat. Menciptakan persaingan yang semakin ketat dan dilema keamanan antara AS-China saat mencermati perubahan regional berdasarkan kajian teoritis analisis lingkungan strategis akan membantu Indonesia mengembangkan

¹³ Ibid, Hal 41

¹⁴ Laksda TNI Agus Setiadji, "Kekuatan Pertahanan Indonesia dalam Bingkai Negara Maritim" dalam <http://maritimnews.com/2017/05/kekuatanpertahanan-indonesia-dalam-bingkai-negaramaritim/>

pertahanannya menjadi strategi yang lebih komprehensif. Analisis lingkungan strategis berikut ini merupakan dasar untuk memetakan peluang dan risiko yang merupakan bagian integral dari lingkungan strategis.

Ketegangan Laut China Selatan akibat persaingan strategis AS dengan China sangat kompleks. Salah satu mandala adalah Laut Cina Selatan (LCS), salah satu indikator lingkungan strategis. VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) (ketidakstabilan, turbulensi kekerasan), ketidakpastian (ketidakpastian karena munculnya masalah baru), kompleksitas (kompleksitas, beberapa kompleksitas masalah), dan ambiguitas (interpretasi masalah), terdiri dari ambiguitas / ambiguitas). Kesimpulan positif atau negatif dan solusi yang baik secara jelas tercermin dalam situasi LCS di bawah ketegangan yang meningkat.

Volatility pada LCS dapat dijelaskan dari situasi yang penuh gejolak akibat ketegangan yang diwarnai tindak militerisasi baik oleh AS dan Sekutunya maupun Cina. *Uncertainty* pada sengketa wilayah LCS nampak pada tindakan Cina untuk membangun pulau-pulau *hybrid* sebagai sebuah isu baru yang menjadi kontroversi. *Complexity* dalam isu LCS mengacu pada kerumitan pada tumpang tindih sengketa wilayah yang melibatkan 6 negara dan belum terselesaikan. Eskalasi kehadiran militer AS-Cina, dan berbagai ancaman non-tradisional yang turut berproliferasi dalam konteks keamanan maritim dengan segala dimensinya menambah kompleksitas permasalahan di LCS¹⁵. Sedangkan ambiguitas tercermin dari persistensi Cina untuk menegaskan klaim wilayah di perairan LCS berdasarkan *nine-dash line*, padahal hal tersebut sudah jelas bertentangan dengan hukum internasional.

Ancaman dari meluasnya isu LCS diantaranya, Ketidakstabilan regional akibat saling provokasi dalam bentuk militerisasi dan prediksi kekuatan lainnya. Ketidakstabilan ini dapat menyebabkan polarisasi global konstelasi global bipolar, yang dikhawatirkan menyebar dan menjadi cikal bakal Perang Dingin ke 2. Tantangan keamanan laut diwujudkan dalam ancaman non-tradisional seperti penangkapan ikan ilegal, pembajakan, perdagangan dan perdagangan narkoba. Sedangkan terdapat juga

¹⁵ Yanuarti, I., Wibisono, M., & Midhio, I. W. (2020). Strategi Kerja Sama Indo-Pasifik Untuk Mendukung Pertahanan Negara: Perspektif Indonesia. *Strategi Perang Semesta*, 6(1). Hal 54.

peluang seperti, Negara-negara di kawasan masih memiliki peluang untuk meredakan ketegangan bersama negara-negara LCS dengan mengembangkan kerja sama berbasis *Confident Building Measures*. Kerja sama maritim yang dikembangkan di bawah payung DOC turut memberikan kesempatan bagi peningkatan kapasitas negara-negara pesertanya seperti *Workshop on Safety of Navigation and Communication at Sea* yang diselenggarakan di Manado pada bulan Desember 2018 sebagai realisasi rencana aksi yang ditetapkan oleh ASEAN-China *Joint Working Group on the Implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea*.

Mengingat ancaman dan peluang tersebut di atas, pemerintah perlu berbuat lebih banyak untuk memastikan efektivitas kerja sama mereka, yang akan menjadi peluang untuk maju dalam kepentingan nasional, terutama yang terkait dengan fungsi pertahanan. Bekerja sama untuk mengatasi ancaman bersama di kawasan dengan memprioritaskan CBM pada akhirnya akan menciptakan lingkungan damai yang mendukung laju pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran rakyat.

Terkait ancaman isu keamanan siber, Indonesia juga berpeluang untuk meningkatkan pertahanan siber yang akan berperan signifikan dalam fungsi perlindungan data, antisipasi *cyberterrorism*, dan perlindungan bagi obyek-obyek vital negara yang strategis dari kejahatan siber.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berbicara tentang konflik Laut China Selatan yang hingga kini belum usai. Dia meyakini pemimpin China dan Amerika Serikat bijaksana serta masalah ini bisa selesai lewat dialog damai. Prabowo Subianto awalnya berbicara tentang kawasan Indo Pasifik dalam pertemuan ASEAN *Defence Ministers Meeting* (ADMM) Plus secara virtual pada Rabu (16/6)¹⁶. Pertemuan ini tak hanya dihadiri menteri pertahanan dari negara-negara ASEAN, tapi juga negara di luar ASEAN. Di awal sambutannya, Prabowo menyapa Menteri Pertahanan Australia Peter Dutton MP, Penasihat Negara dan Menteri Pertahanan Nasional dari Republik Rakyat China Jenderal Wei Fenghe, Menteri Pertahanan India Shri Rajnath Singh, Menhan

¹⁶ Detiknews.2021. Prabowo Bicara Konflik Laut China Selatan: Pemimpin China dan AS Bijaksana. <https://news.detik.com/berita/d-5610702/prabowo-bicara-konflik-laut-china-selatan-pemimpin-china-dan-as-bijaksana>

Jepang Kishi Nobu, Menteri Pertahanan Nasional dari Republik Korea Suh Wook, Wakil Menteri Pertahanan Federasi Rusia Jenderal Andrey Kartapolov, Menteri Pertahanan dari Selandia Baru Peeni Henare, dan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd J Austin III.

Mengingat AOIP juga berangkat dari perspektif yang digagas Indonesia, maka Indonesia pun perlu menjadikan dokumen *outlook* tersebut sebagai dasar untuk menyusun strategi kerja sama yang diprioritaskan dalam mendukung pertahanan negara. Mengingat konsep Indo-Pasifik mencurahkan perhatian yang lebih luas pada dimensi maritim, maka korelasi strategi pertahanan juga perlu dititikberatkan pada strategi pertahanan maritim.

Pertahanan maritim tentu juga akan mencakup aspek militer dan nirmiliter mengingat strategi pertahanan negara menurut Buku Putih Pertahanan Indonesia (2015) didesain untuk dapat menangkal ancaman yang bersifat militer maupun non militer. Oleh karena itu strategi kerja sama dalam kerangka AOIP juga perlu diarahkan pada penguatan pertahanan militer dan nirmiliter yang didominasi dimensi kemaritiman sesuai dengan area kerja sama AOIP.

KESIMPULAN

Sebagai respons dari adanya berbagai kebijakan China di Indo-Pasifik yang salah satunya klaim sepihak Laut China Selatan, AS mengeluarkan berbagai kebijakan pertahanan di kawasan tersebut karena menganggap bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh China merupakan ancaman bagi kepentingan AS di kawasan Indo-Pasifik. Kebijakan-kebijakan tersebut diantaranya terdapat pengaktifan kembali aliansi *Quad*, Operasi *Freedom of Navigations*, melakukan komunikasi aktif dengan ASEAN untuk menerapkan *Free and Open Indo-Pacific*, dan membentuk aliansi trilateral strategis bernama AUKUS untuk membuat kapal selam bertenaga nuklir dan menjaga keamanan kawasan Indo-Pasifik.

Dampak dari adanya kebijakan AS di Indo-Pasifik yang terbilang cukup agresif dan dapat memicu perang kapanpun melawan China, untuk saat ini kecenderungan

terjadinya konflik tradisional antara AS dan China mungkin saja dapat terjadi kapanpun, dikhawatirkan konflik ini dapat menyebar dengan masuknya berbagai negara ke dalam ketegangan kawasan ini. Indonesia sebagai salah satu negara yang terdapat di kawasan Indo-Pasifik tentu perlu waspada dengan adanya kemungkinan perang karena AS dan China telah mengirimkan alutsista mereka ke wilayah LCS. Indonesia perlu meningkatkan pertahanan dalam rangka mengamankan kedaulatan negara, serta memposisikan diri dalam isu ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, M. (2020). Kebijakan Freedom Of Navigation Amerika Serikat Di Laut Tiongkok Selatan. *WANUA: Jurnal Hubungan Internasional*, 5(2), 122-151.
- Berkofsky, A. (2018). US Freedom of Navigation Operations (FONOPs) in the South China Sea—Able to Keep Chinese Territorial Expansionism in Check?. In *US Foreign Policy in a Challenging World* (pp. 339-356). Springer, Cham.
- Darmawan, A. B., & Ndadari, G. L. (2017). Keterlibatan Amerika Serikat dalam Sengketa Laut Tiongkok Selatan pada Masa Pemerintahan Presiden Barack Obama. *Jurnal Hubungan Internasional*, 6(1), 1-15
- Daugirdas, K., & Mortenson, J. D. (2015). US Navy Continues Freedom of Navigation and Overflight Missions in the South China Sea Despite China's "Island-Building" Campaign. *The American Journal of International Law*, 109(3), 667.
- Detiknews.2021. Prabowo Bicara Konflik Laut China Selatan: Pemimpin China dan AS Bijaksana. <https://news.detik.com/berita/d-5610702/prabowo-bicara-konflik-laut-china-selatan-pemimpin-china-dan-as-bijaksana>
- Fouse, D. (2015). US-Japan Alliance Confronts the Anti-Access and Area Denial Challenge: Toward Building Capacity, Cooperation and Information Sharing in the Western Pacific. Asia-Pacific Center for Security Studies Honolulu United States
- Harun, U. (2020). Buku: Politik Kebijakan Poros Maritim.

- Gale, J. B., & Shearer, A. (2018). The Quadrilateral Security Dialogue and the Maritime Silk Road Initiative. Center for Strategic and International Studies (CSIS).
- Laksda TNI Agus Setiadji, “Kekuatan Pertahanan Indonesia dalam Bingkai Negara Maritim” dalam <http://maritimnews.com/2017/05/kekuatanpertahanan-indonesia-dalam-bingkai-negaramaritim/>
- Nathalia, T. (2018). Indonesia presents Indo-Pacific cooperation concept at ASEAN ministerial meeting. Jakarta Globe.
- Suharman, Y. (2019). Dilema Keamanan dan Respons Kolektif ASEAN Terhadap Sengketa Laut Cina Selatan. *Intermestic: Journal of International Studies*, 3(2), 127-146.
- Wang, J. C. (1992). *Handbook on Ocean Politics & Law*. Greenwood Publishing Group
- Yanuarti, I., Wibisono, M., & Midhio, I. W. (2020). Strategi Kerja Sama Indo-Pasifik Untuk Mendukung Pertahanan Negara: Perspektif Indonesia. *Strategi Perang Semesta*, 6(1)